

BAB II

KONDISI SOSIAL-POLITIK AFGHANISTAN PASCA TALIBAN

BERKUASA (2021–2024)

Bab ini membahas mengenai kondisi sosial-politik Afghanistan pasca kembalinya kekuasaan Taliban pada tahun 2021, dengan fokus pada dampaknya terhadap perempuan. Melanjutkan pembahasan dari Bab sebelumnya, akan diuraikan mengenai perubahan kebijakan dan struktur masyarakat yang berpengaruh terhadap akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, serta ruang partisipasi publik. Pemaparan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tantangan faktual yang menjadi latar dari strategi UN Women dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan di Afghanistan.

Melalui analisis terhadap regulasi domestik, kebijakan berbasis norma keagamaan, serta dinamika respons masyarakat sipil, bab ini memberikan landasan empiris bagi pembahasan strategi UN Women pada bab selanjutnya. Penekanan diberikan pada bagaimana peraturan yang melibatkan pembatasan atas ruang gerak perempuan terjadi secara struktural, serta bagaimana aktor lokal, termasuk komunitas perempuan dan diaspora, beradaptasi dalam menghadapi situasi tersebut. Dengan demikian, bab ini menjawab kebutuhan untuk memahami konteks lokal sebagai dasar untuk menelaah bagaimana UN Women menjalankan perannya dalam situasi yang kompleks dan penuh keterbatasan.

2.1 Konteks Kembalinya Taliban dan Perubahan Sosial-Politik Afghanistan

Keberadaan Taliban di Afghanistan bukan merupakan hal yang baru bagi negara tersebut. Dengan kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan pada Agustus 2021 menandai babak baru yang penuh ketidakpastian bagi masa depan perempuan di Afghanistan, dimana hak-hak mereka akan kembali seperti pada tahun 1996-2001 saat Taliban pertama kali memerintah di Afghanistan. Oleh karena itu pada bagian ini akan dibahas mengenai konteks kemunculan kembali Taliban sebagai aktor dominan dalam politik Afghanistan dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan dinamika historis, ideologi, serta transformasi sosial-politik negara tersebut. Dengan menelusuri latar belakang historis hingga perkembangan pasca-2001, bagian ini memberikan landasan untuk memahami perubahan struktur kekuasaan dan dampaknya terhadap sistem pemerintahan dan masyarakat, khususnya menjelang dan setelah pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada 2021.

2.1.1 Asal usul Taliban dan Dinamika Politik Pasca Perang Dingin

Pasca Perang Dunia II, kawasan Asia Selatan dan Timur Tengah menjadi medan persaingan geopolitik antara kekuatan besar, terutama selama era Perang Dingin. Invasi Uni Soviet ke Afghanistan pada tahun 1979 merupakan titik balik penting dalam konflik regional, yang memberikan dampak berkelanjutan terhadap tatanan politik dan sosial Afghanistan. Intervensi militer yang dilakukan Uni Soviet untuk mempertahankan pemerintahan komunis di Kabul ini kemudian mendapatkan perlawanan dari kelompok-kelompok Islamis lokal yang dikenal sebagai *mujahidin*. Perang ini berlangsung selama satu dekade (1979–1989) dan

menewaskan ratusan ribu warga sipil serta menyebabkan jutaan pengungsi, melarikan diri ke Pakistan dan Iran (Armajani, 2021).

Dalam konflik ini, *mujahidin* memperoleh dukungan luas dari berbagai negara, terutama Amerika Serikat, Pakistan, dan Arab Saudi. Dukungan ini diberikan dalam bentuk finansial, persenjataan, pelatihan militer, serta dukungan ideologis. Amerika Serikat melalui operasi CIA “*Operation Cyclone*” menyalurkan bantuan militer ke kelompok *mujahidin* sebagai bagian dari strategi menahan ekspansi komunis. Sementara itu, Pakistan, melalui *Inter-Services Intelligence* (ISI), bertindak sebagai perantara utama distribusi bantuan tersebut, sekaligus mendorong kepentingan nasionalnya di Afghanistan (Armajani, 2021). Arab Saudi pun turut berperan besar dalam membiayai pembangunan madrasah di wilayah perbatasan Afghanistan–Pakistan, yang kemudian menjadi pusat penyebaran ideologi Islam konservatif, khususnya aliran Deobandi, yang kelak membentuk basis ideologi Taliban (Linschoten & Kuehn, 2012).

Setelah penarikan pasukan Soviet pada tahun 1989, Afghanistan tidak segera menemukan stabilitas. Justru sebaliknya, negara ini terjerumus dalam perang saudara antar faksi *mujahidin*. Kelompok-kelompok yang sebelumnya bersatu melawan Soviet kini saling bersaing memperebutkan kekuasaan. Perang saudara ini melumpuhkan fungsi negara, menghancurkan infrastruktur, dan menciptakan kekosongan otoritas yang menyebabkan penderitaan besar bagi masyarakat sipil. Dalam konteks inilah Taliban muncul pada sekitar tahun 1994 di Kandahar sebagai

reaksi terhadap kekacauan internal dan ketidakmampuan para *warlord*¹ dalam menciptakan ketertiban (Johnson, DuPee, & Shaaker, 2017). Taliban awalnya mendapat dukungan dari masyarakat lokal karena menawarkan stabilitas, ketertiban, dan penegakan hukum berbasis syariat Islam yang dipandang lebih adil daripada kekerasan tak beraturan yang dilakukan para komandan milisi (Leede, 2014).

Kemunculan Taliban berkaitan erat dengan jaringan madrasah Deobandi di Pakistan, yang menjadi tempat pendidikan bagi banyak kader awal gerakan ini. Para murid, atau *taliban*, merupakan pelajar agama yang dididik dalam lingkungan pendidikan yang menekankan kepatuhan mutlak terhadap ajaran Islam konservatif, penolakan terhadap modernitas, dan segregasi sosial, khususnya terhadap perempuan. Didikan madrasah ini tidak hanya mencetak pemahaman agama, tetapi juga menanamkan semangat jihad dan ketaatan ideologis terhadap tatanan sosial yang patriarkis. Dukungan yang diberikan oleh Pakistan dan Arab Saudi terhadap madrasah-madrasah ini, baik dalam bentuk finansial maupun ideologis, secara tidak langsung memperkuat basis sosial dan militansi Taliban dalam upaya merebut kekuasaan politik di Afghanistan (Gosh, 2022; Linschoten & Kuehn, 2012)

2.1.2 Ideologi Taliban dan Pembentukan Norma Islam Konservatif

Ideologi Taliban dibentuk dari perpaduan tiga sumber utama, ajaran Deobandisme, pengaruh Wahhabisme, dan nasionalisme etno-religius Pashtun. Deobandisme merupakan gerakan reformasi Islam yang berkembang di India abad

¹ *Warlord* adalah pemimpin milisi lokal yang menjalankan pemerintahan de facto di wilayah tertentu, sering kali secara represif, dengan melakukan penjarahan, kekerasan seksual, dan pemerasan terhadap warga sipil (Linschoten & Kuehn, 2012).

ke-19, yang menekankan pemurnian ajaran Islam, penolakan terhadap sinkretisme, dan ketaatan terhadap *fiqh Hanafi* yang ketat. Taliban, yang sebagian besar anggotanya berasal dari madrasah Deobandi di wilayah Pakistan, menginternalisasi ajaran tersebut dalam bentuk yang lebih kaku dan literal dibandingkan dengan bentuk aslinya (Linschoten & Kuehn, 2012). Pengaruh Wahhabisme dari Arab Saudi—yang masuk melalui bantuan finansial dan dukungan ideologis selama Perang Soviet–Afghanistan—memperkuat orientasi puritan mereka. Selain itu, norma-norma patriarkis dari kode kehormatan Pashtunwali, seperti *nang* (kehormatan), *badal* (balas dendam), serta kontrol atas *zar* (emas), *zan* (perempuan), dan *zamin* (tanah), yang memuliakan kehormatan laki-laki dan subordinasi perempuan, juga memperkuat corak konservatif dalam struktur sosial Taliban (Johnson, DuPee, & Shaaker, 2017). Dengan demikian, ideologi mereka mencerminkan sintesis antara pemurnian agama dan konservatisme kultural etnis Pashtun (Armajani, 2021).

Kondisi geopolitik selama dan pasca Perang Dingin merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pembentukan ideologi dan nilai-norma Taliban. Dukungan besar-besaran dari Amerika Serikat, Pakistan, dan Arab Saudi terhadap kelompok mujahidin selama perang melawan Uni Soviet tidak hanya berbentuk logistik dan persenjataan, tetapi juga berupa arus ideologi. *Inter-Services Intelligence* (ISI) menjadi kanal utama dalam melakukan distribusi dana dan rekrutmen milisi, sekaligus mempromosikan Islam politik versi *Jama'at-i Islami*. Sementara Arab Saudi, melalui lembaga keagamaan dan filantropinya, menyebarkan paham *Wahhabi* serta membiayai madrasah konservatif di wilayah

perbatasan Afghanistan–Pakistan. Bantuan ini akhirnya menciptakan basis ideologis bagi generasi baru pelajar agama (taliban) yang dibesarkan dalam lingkungan yang sangat homogen secara agama, sosial, dan politik, serta sangat mencurigai modernitas dan pluralisme (Armajani, 2021).

Dalam kerangka ideologi tersebut, Taliban mengembangkan interpretasi syariat Islam versi mereka yang bersifat konservatif dan patriarkal. Mereka meyakini bahwa seluruh aspek kehidupan harus tunduk pada hukum agama sebagaimana mereka tafsirkan secara literal. Penafsiran ini menolak adanya ruang *ijtihad* atau adaptasi terhadap konteks sosial modern. Norma-norma sosial yang diterapkan meliputi segregasi gender ekstrem, pelarangan terhadap perempuan untuk bersekolah atau bekerja, serta penerapan pakaian seperti *chadari* (burqa) dan pembatasan mobilitas perempuan tanpa mahram. Dalam sistem hukum Taliban, pelanggaran moral dijatuhi hukuman keras seperti rajam, amputasi, atau cambuk di ruang publik. Untuk menegakkan tatanan ini, Taliban mendirikan Departemen Amar Ma'ruf Nahi Munkar, yang bertindak sebagai polisi moral untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap standar agama dan moral versi mereka (Leede, 2014).

Pandangan Taliban mengenai syariat sangat kontras dengan Islam moderat, yang berkembang baik di banyak negara Muslim, termasuk di sebagian wilayah Afghanistan sebelum tahun 1996. Islam moderat mengedepankan pendekatan *maqashid syariah* dan *ijtihad* sebagai alat untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan dan realitas masyarakat. Di sisi lain, pendekatan Taliban bersifat eksklusif dan represif, menolak hak-hak dasar seperti pendidikan dan partisipasi

politik bagi perempuan, serta memandang demokrasi sebagai sistem kafir. Sebagaimana dicatat oleh Seran de Leede (2014), rezim Taliban tidak mengembangkan sistem negara Islam yang inklusif, tetapi justru menciptakan masyarakat monolitik yang dikontrol oleh penafsiran sempit atas agama dan didominasi oleh laki-laki, dengan perempuan hanya dianggap sebagai subjek perlindungan dan objek moral. Dengan demikian, nilai dan norma yang dianut oleh Taliban merupakan hasil dari interaksi antara warisan tradisi Islam konservatif, budaya patriarkis lokal, serta intervensi geopolitik internasional. Dukungan dan penyaringan ideologi oleh aktor asing seperti Arab Saudi dan Pakistan memperkuat pola konservatif yang sudah ada, dan mempersempit kemungkinan tumbuhnya interpretasi Islam yang lebih kontekstual dan inklusif di Afghanistan (Moghadam, 1993).

2.1.3 Taliban dalam Sejarah Politik Afghanistan (1996–2001)

Pada tahun 1996, Taliban secara *de facto* berhasil menguasai Kabul dan mendirikan *Islamic Emirate of Afghanistan*. Kehadiran Taliban sebagai pemerintah baru Afghanistan kemudian diakui secara terbatas oleh hanya tiga negara: Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Pemerintahan ini menerapkan sistem otoriter berbasis interpretasi konservatif terhadap syariat Islam. Struktur negara dibentuk secara sentralistik, di mana Mullah Mohammad Omar diangkat sebagai *Amir al-Mu'minin* (Pemimpin Kaum Beriman) dan memegang otoritas keagamaan serta politik tertinggi. Konstitusi tidak diberlakukan, sistem parlemen ditiadakan, dan semua jabatan tinggi diisi oleh tokoh senior Taliban yang berasal dari etnis Pashtun dan seluruhnya laki-laki (Gosh, 2022).

Selama periode pemerintahan 1996–2001, kebijakan domestik Taliban ditandai oleh pembatasan ekstrem terhadap hak-hak sipil, terutama bagi perempuan. Taliban menutup akses pendidikan formal bagi perempuan dan melarang mereka bekerja di sektor publik. Aktivitas di luar rumah hanya diperbolehkan jika perempuan didampingi oleh mahram, sementara penggunaan *chadari* (burqa) diwajibkan secara ketat (Leede, 2014; HRW, 2001). Norma-norma moral ditegakkan melalui lembaga *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* yang bertugas mengawasi kepatuhan masyarakat terhadap aturan Taliban. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi fisik di ruang publik terhadap individu yang dianggap melanggar hukum agama, termasuk cambuk dan rajam (Armajani, 2021). Taliban juga melarang musik, televisi, fotografi, dan bentuk hiburan lain yang dianggap bertentangan dengan nilai Islam versi mereka (Coll, 2004). Kebijakan yang diskriminatif tidak hanya menyasar perempuan, tetapi juga kelompok etnis dan agama minoritas. Kelompok Hazara Syiah mengalami kekerasan sistematis, termasuk dalam insiden pembantaian massal di Mazar-i Sharif tahun 1998 yang menewaskan ribuan warga sipil (HRW, 1998; Armajani, 2021). Insiden ini menambah tekanan internasional terhadap Taliban dan hampir memicu konflik bersenjata antara Afghanistan dan Iran.

Rezim Taliban pada periode ini mengalami isolasi internasional yang signifikan. Hanya tiga negara—Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab—yang memberikan pengakuan diplomatik resmi. Masyarakat internasional secara luas menolak legitimasi Taliban karena praktik pelanggaran hak asasi manusia, represi terhadap perempuan, dan kegagalan membentuk pemerintahan yang inklusif.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa merespons dengan mengeluarkan Resolusi 1214 tahun 1998 yang menyerukan pembentukan pemerintahan representatif dan mengutuk kekerasan terhadap perempuan serta kelompok minoritas (UNSC, 1998; Gosh, 2022).

Pemerintahan Taliban berakhir secara militer setelah peristiwa serangan teror 11 September 2001 di Amerika Serikat, yang dilakukan oleh Al-Qaeda. Taliban yang memberi perlindungan kepada pemimpin Al-Qaeda, Osama bin Laden, menolak tuntutan Amerika Serikat untuk menyerahkannya. Sebagai akibatnya, pada Oktober 2001, Amerika Serikat bersama koalisi internasional meluncurkan operasi militer Operasi *Enduring Freedom* yang berhasil menggulingkan Taliban dari Kabul hanya dalam waktu beberapa minggu. Kekuasaan Taliban secara formal berakhir pada akhir tahun 2001, dan digantikan oleh pemerintahan transisi yang didukung oleh komunitas internasional (Johnson, 2018; Coll, 2004). Meskipun demikian, jatuhnya rezim tidak serta-merta menghapus pengaruh Taliban. Sebagian besar tokoh utama Taliban melarikan diri ke wilayah perbatasan Afghanistan–Pakistan dan mulai membangun kembali kekuatan sebagai gerakan insurgensi. Pengalaman pemerintahan periode 1996–2001 kemudian menjadi fondasi ideologis dan strategis bagi gerakan Taliban di masa-masa berikutnya.

2.1.4 Keadaan Sosial-Politik Afghanistan Selama Masa Transisi (2002-2021)

Runtuhnya pemerintahan Taliban pada akhir 2001 menjadi titik awal bagi Afghanistan dalam memasuki fase transisi politik yang ditandai dengan upaya rekonstruksi negara, pemulihan sosial, dan integrasi kembali ke dalam komunitas

internasional. Dengan dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan aliansi Barat, proses ini diformalkan melalui Konferensi Bonn yang melahirkan kerangka pemerintahan transisi dan rencana pembentukan institusi negara berbasis demokrasi. Hasilnya adalah pengesahan Konstitusi Afghanistan pada tahun 2004, yang menetapkan negara sebagai republik Islam dengan sistem presidensial, menjamin hak-hak dasar warga negara, serta membuka ruang partisipasi politik yang lebih inklusif (Gosh, 2022).

Sebagai bagian dari konsolidasi kelembagaan, pemilihan umum dilaksanakan secara berkala mulai tahun 2004, meliputi pemilihan presiden, parlemen, dan dewan provinsi. Pemilu ini dimaksudkan sebagai bentuk legitimasi demokratis terhadap pemerintahan yang terbentuk, sekaligus untuk memperkuat keterlibatan publik dalam proses politik (UN Women, 2022). Pada saat yang sama, pemerintah dan komunitas internasional membentuk lembaga-lembaga negara yang bertujuan untuk mempromosikan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia, salah satunya adalah Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC). Lembaga ini memiliki mandat untuk memantau pelanggaran HAM, memberikan pendidikan publik tentang hak-hak sipil, serta mendorong keadilan bagi korban konflik (UN Human Rights Council, 2021).

Salah satu sektor yang menunjukkan kemajuan paling nyata selama masa transisi adalah pemberdayaan perempuan, khususnya dalam bidang pendidikan dan partisipasi politik. Data UNICEF mencatat bahwa angka perempuan melek huruf meningkat dari sekitar 12% pada tahun 2001 menjadi 30% pada 2018, sementara jumlah anak perempuan yang terdaftar di sekolah dasar melonjak hingga mencapai

sekitar 2,5 juta pada tahun 2021 (UNICEF, 2021). Akses terhadap pendidikan tinggi juga meningkat secara bertahap, dengan semakin banyak perempuan yang menempuh jenjang universitas atau pelatihan profesional.

Kemajuan ini juga tercermin dalam partisipasi politik perempuan. Dalam pemilu legislatif terakhir sebelum kembalinya Taliban, sebanyak 27% kursi di parlemen nasional diisi oleh perempuan (World Bank, 2023). Selain itu, perempuan mulai menempati berbagai posisi penting di sektor pemerintahan, media, dan lembaga masyarakat sipil. Kebebasan perempuan untuk bergerak dan bersosialisasi mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan era pemerintahan Taliban sebelumnya (Limaye, 2023).

Keberhasilan tersebut sebagian besar ditopang oleh peran aktif lembaga-lembaga internasional seperti UN Women, USAID, dan organisasi non-pemerintah global lainnya. UN Women, misalnya, terlibat dalam penguatan kapasitas kepemimpinan perempuan, pelatihan gender bagi aparaturnya pemerintah, serta advokasi untuk pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik (UN Women, 2022). Di samping dukungan struktural, berbagai program intervensi juga mendorong partisipasi perempuan dalam proses perdamaian lokal dan mediasi konflik, khususnya di wilayah-wilayah rawan.

Namun demikian, kemajuan ini tidak sepenuhnya merata. Di banyak wilayah pedesaan, norma patriarkal dan interpretasi konservatif terhadap agama tetap menjadi penghalang terhadap implementasi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Penolakan terhadap pendidikan perempuan atau keikutsertaan mereka dalam ranah publik masih terjadi, diperparah oleh lemahnya penegakan

hukum di tingkat lokal (Limaye, 2023). Di sisi lain, keberlangsungan sistem politik yang dibangun juga menghadapi tantangan serius, seperti korupsi, inefisiensi birokrasi, dan ketergantungan struktural terhadap bantuan asing.

Menjelang 2021, krisis kepercayaan terhadap pemerintahan sipil semakin mendalam. Proses perdamaian antara pemerintah dan Taliban berjalan stagnan, sementara keputusan Amerika Serikat untuk menarik seluruh pasukannya dari Afghanistan menciptakan kekosongan kekuasaan yang kemudian dimanfaatkan Taliban untuk mengambil alih kembali kendali negara (Melchionni, 2022). Dengan demikian, meskipun dua dekade transisi telah menciptakan sejumlah kemajuan penting, fondasi sosial-politik Afghanistan tetap rapuh dan sangat rentan terhadap disrupsi politik yang akhirnya kembali terjadi pada pertengahan 2021.

2.1.5 Kembalinya Taliban ke Kekuasaan pada 2021

Setelah dua dekade upaya rekonstruksi politik dan sosial, Afghanistan kembali menghadapi ketidakstabilan yang memuncak pada pertengahan 2021. Keputusan Amerika Serikat untuk menarik seluruh pasukannya dari Afghanistan menjadi pemicu utama krisis baru tersebut. Pengumuman resmi penarikan disampaikan oleh Presiden Joe Biden pada April 2021, yang menetapkan batas waktu hingga 11 September 2021, bertepatan dengan peringatan dua dekade serangan 9/11. Pengumuman ini segera diikuti oleh penarikan pasukan dari negara-negara sekutu, termasuk NATO (Melchionni, 2022). Penarikan ini dilaksanakan lebih cepat dari jadwal, dan salah satu simbol terkuatnya adalah ditinggalkannya Pangkalan Udara Bagram pada awal Juli tanpa pemberitahuan kepada otoritas lokal (Gosh, 2022).

Dalam situasi tanpa kehadiran militer asing yang signifikan, Taliban dengan cepat meluncurkan ofensif ke berbagai kota besar. Pasukan keamanan nasional Afghanistan yang bergantung pada dukungan logistik dan intelijen Barat gagal memberikan perlawanan berarti. Proses pengambilalihan kekuasaan berlangsung cepat, dan pada 15 Agustus 2021, Kabul jatuh ke tangan Taliban tanpa pertempuran besar. Presiden Ashraf Ghani memilih melarikan diri ke luar negeri, menyatakan bahwa keputusannya bertujuan menghindari pertumpahan darah, meskipun tindakannya memicu kritik luas di dalam negeri (BBC News, 2021; Melchionni, 2022).

Tak lama setelah jatuhnya Kabul, Taliban dengan cepat mendeklarasikan pembentukan kembali *Emirat Islam Afghanistan* dan melakukan reorganisasi terhadap sistem pemerintahan. Pada awal September 2021, mereka mengumumkan struktur pemerintahan sementara yang seluruh anggotanya adalah laki-laki dan sebagian besar berasal dari etnis Pashtun serta kelompok senior Taliban. Tidak ada posisi yang diberikan kepada perempuan atau kelompok etnis minoritas, sekaligus menegaskan bahwa arah pemerintahan baru akan mengikuti garis ideologis yang sama dengan era 1996–2001 (Maizland, 2023).

Salah satu langkah awal yang menandai pembentukan rezim baru adalah penolakan terhadap Konstitusi 2004 yang menjadi dasar pemerintahan demokratis selama masa transisi. Taliban secara eksplisit menolak legitimasi konstitusi tersebut dan membubarkan lembaga-lembaga demokratis seperti parlemen dan Mahkamah Konstitusi. Sebagai gantinya, pemerintahan Taliban diorganisasi berdasarkan struktur kepemimpinan yang sangat tersentralisasi, dengan otoritas keagamaan dan

politik berada di tangan pemimpin tertinggi, *Amir al-Mu'minin* (Gosh, 2022; UN News, 2022).

Dalam konteks hukum, Taliban mulai menerapkan interpretasi ketat atas syariat Islam versi mereka. Pada akhir 2022, Mahkamah Agung di bawah otoritas Taliban mengeluarkan instruksi kepada para hakim untuk kembali memberlakukan bentuk-bentuk hukuman seperti cambuk dan rajam terhadap pelanggaran moral dan pidana tertentu. Beberapa hukuman telah dijalankan secara publik, mengingatkan kembali pada metode penegakan hukum era sebelumnya (Maizland, 2023). Selain itu, institusi *Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice*—lembaga moralitas publik yang pernah aktif pada 1996–2001—diaktifkan kembali dengan kewenangan luas dalam mengawasi perilaku masyarakat, terutama perempuan (Limaye, 2023).

Langkah signifikan lainnya adalah penonaktifan Kementerian Urusan Perempuan, yang sebelumnya berperan dalam memperluas partisipasi dan perlindungan hak-hak perempuan. Kantor kementerian tersebut digantikan oleh lembaga pengawas moralitas, dan bangunannya secara simbolik diserahkan kepada *Ministry for the Propagation of Virtue*, mempertegas pergeseran paradigma dari pemberdayaan menuju pengawasan sosial yang represif (UN Women, 2022).

Dengan kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan, perubahan besar terjadi dalam tatanan sosial-politik Afghanistan. Capaian-capaian yang diperoleh selama dua dekade transisi, terutama dalam bidang hak asasi manusia dan partisipasi perempuan, mengalami kemunduran tajam. Rezim Taliban sekali lagi menerapkan kerangka kekuasaan yang eksklusif dan otoriter, yang ditopang oleh narasi agama

konservatif serta struktur patriarkal. Kebijakan yang membatasi kehidupan perempuan secara drastis mulai diberlakukan kembali, dan dalam perkembangannya akan semakin diperluas mencakup berbagai sektor kehidupan masyarakat.

2.2 Perubahan Kebijakan dan Dampaknya Terhadap Perempuan dalam Berbagai Sektor

Selama masa kekuasaanya, Taliban telah mengeluarkan lebih 100 dekrit yang sebagian besar berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perempuan di Afghanistan, terlebih di ruang public (UNHCR, 2021). Pembatasan ini diberlakukan pada hampir seluruh aspek kehidupan dan kebebasan perempuan yang didasarkan pada interpretasi ketat dari hukum syariah. Selama keberjalanannya, pengaturan ini tidak hanya menyasar kepada ruang privat saja, akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, partisipasi publik, hingga hak-hak sipil lainnya juga mengalami perubahan yang signifikan. Kebanyakan dari kebijakan tersebut dianggap bersifat represif dan diskriminatif terhadap perempuan, mempersempit ruang gerak perempuan, dan tidak sedikit dari mereka yang merasa terasingkan dari kehidupan sosial-politik secara menyeluruh.

Tabel 2.1 Timeline peraturan pembatasan terhadap perempuan yang diberlakukan oleh rezim

Taliban di Afghanistan 2021-2024

Tahun	Bulan	Kebijakan dan Larangan terhadap Perempuan
2021	September	• Perempuan dilarang bermain olahraga.

		• Kementerian Urusan Perempuan dibubarkan dan digantikan oleh Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan (PVPV). • Pegawai perempuan pemerintah diminta tetap tinggal di rumah.
	November	• Jurnalis dan pembawa acara perempuan dilarang tampil di televisi tanpa penutup wajah penuh.
	Desember	• Perempuan wajib didampingi <i>mahram</i> (kerabat laki-laki) jika bepergian lebih dari 78 km. • Dikeluarkan dekrit hak-hak perempuan yang mencakup hak waris, larangan pernikahan paksa, dan penghapusan praktik baad.
2022	Maret	• Pendidikan menengah untuk anak perempuan dihentikan setelah kelas 6.
	Mei	• Perempuan diwajibkan mengenakan hijab yang sesuai, diutamakan burqa, atau tidak keluar rumah tanpa alasan sah.
	Agustus	• Pegawai perempuan Kementerian Keuangan diminta mengirim kerabat laki-laki sebagai pengganti mereka untuk bekerja.

	November	Perempuan dilarang memasuki pemandian umum, taman umum, gym, klub olahraga, dan taman hiburan.
	Desember	- Perempuan dilarang bekerja di LSM nasional maupun internasional. - Anak perempuan dan perempuan dilarang menempuh pendidikan tinggi.
2023	April	Larangan kerja di LSM diperluas hingga mencakup entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa.
	Mei	Dokter perempuan dilarang mengikuti ujian penyelesaian spesialisasi di Kementerian Kesehatan <i>de facto</i>.
	Juni	LSM internasional dilarang menyelenggarakan kegiatan pendidikan berbasis komunitas.
	Juli	Salon kecantikan diperintahkan tutup dalam waktu satu bulan.
	November	Kementerian Kesehatan <i>de facto</i> melarang layanan dukungan psikososial, pusat kesehatan ramah perempuan, dan kegiatan sosial lainnya.
2024	Juni	Gaji pegawai perempuan pemerintah dibatasi maksimum 5.000 Afghani per bulan (tanpa kejelasan sektor dan jabatan).

	Juli	• Undang-Undang Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan diumumkan: perempuan dilarang bepergian tanpa mahram, dan harus menyembunyikan suara di depan umum.
	Desember	• Perempuan dilarang menempuh pendidikan di sektor kesehatan (termasuk keperawatan dan kebidanan), menghentikan pelatihan tenaga medis perempuan.

(Sumber: UN Women, 2025)

2.2.1 Bidang Pendidikan

Pengaturan dalam bidang pendidikan diawali pada 12 September 2021, dimana pemerintahan Taliban menerapkan kebijakan yang tidak mengizinkan perempuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah dan universitas, sebagaimana tercermin dalam sejumlah dekret resmi sejak 2021. Anak perempuan hanya diperbolehkan untuk menempuh pendidikan sampai kelas 6. Kebijakan ini menyebabkan sekitar 80% anak perempuan usia muda putus sekolah (UN Women, 2024). Sekitar 1,1 juta anak perempuan usia sekolah menengah kehilangan akses terhadap pendidikan formal (Arab News, 2024). Beberapa sekolah dasar untuk perempuan tetap dibuka, namun sekitar 30% anak perempuan di Afghanistan bahkan belum mendapatkan pendidikan dasar akibat terkekang norma sosial budaya, biaya pendidikan yang mahal, serta kekhawatiran para orang tua terhadap

keamanan dan keselamatan anak perempuan yang belum terjamin.

Gambar 2.1 Ruang kelas yang kosong akibat dari Rezim Pembatasan Taliban.



(Sumber: Human Rights Watch, 2021)

Kebijakan pelarangan pendidikan bagi anak perempuan di bawah rezim Taliban tidak hanya berdampak pada tingkat menengah dan universitas, tetapi secara perlahan mulai merambat pada pendidikan dasar. Meski secara resmi anak perempuan masih diperbolehkan bersekolah hingga kelas enam, akses terhadap sekolah dasar bagi anak perempuan pun semakin terbatas, terutama di wilayah pedesaan. Bahkan sebelum Taliban kembali berkuasa, menurut Center for Global Development, tingkat partisipasi anak perempuan di sekolah dasar sudah menunjukkan kesenjangan yang mencolok—sekitar 70% di daerah perkotaan bersekolah, sementara di daerah pedesaan hanya 40% (Batha, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa pembatasan yang diberlakukan saat ini memperparah

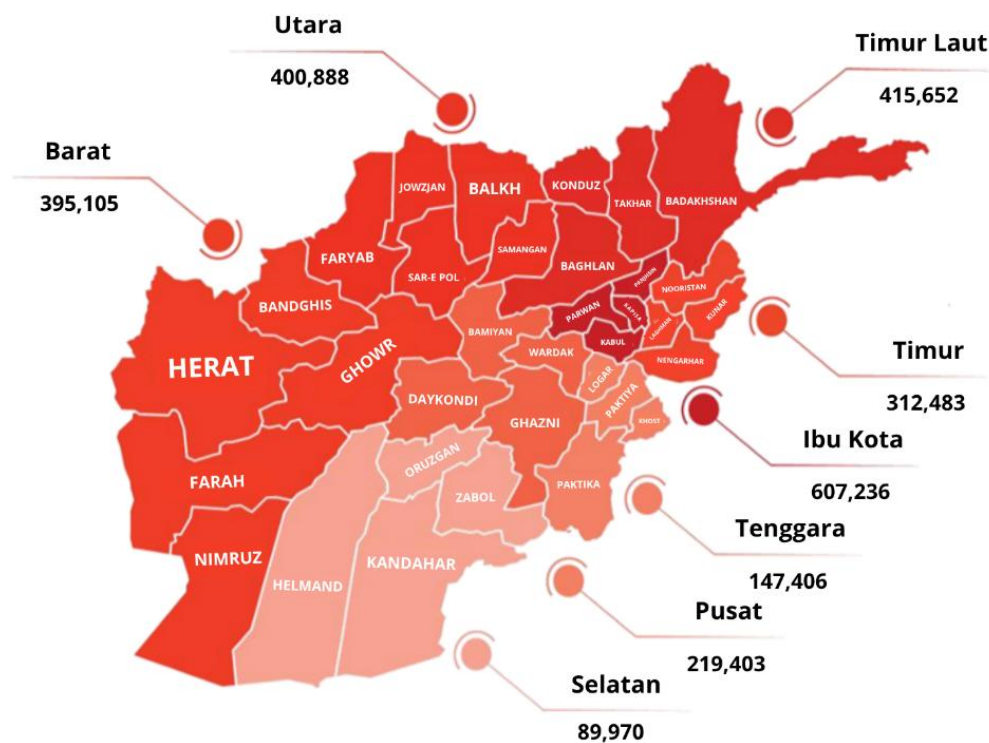
kondisi akses pendidikan yang sebelumnya memang sudah rentan, khususnya bagi anak perempuan di wilayah terpencil. Banyak sekolah dasar yang hanya beroperasi secara terbatas atau bahkan tutup total karena minimnya guru perempuan dan tekanan lokal untuk mengikuti norma yang diperketat.

Kondisi ini diperburuk oleh larangan pendidikan bagi anak perempuan, yang dalam jangka panjang akan menyebabkan kekurangan tenaga profesional perempuan, termasuk guru, sehingga semakin mempersempit akses pendidikan dasar bagi anak perempuan, khususnya di wilayah terpencil (Fetrat, 2024). Dalam praktiknya, kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Taliban tidak semata-mata bersifat eksplisit dalam bentuk pelarangan langsung terhadap akses pendidikan bagi kelompok tertentu, khususnya perempuan, tetapi juga dilakukan melalui pendekatan struktural yang bersifat tidak langsung. Hal ini tercermin dalam pembatasan kurikulum menjadi fokus pada ajaran keagamaan sesuai interpretasi Taliban, penghapusan mata pelajaran umum seperti sains, kewarganegaraan, dan seni, serta penunjukan tokoh-tokoh dari lingkungan madrasah sebagai pengganti tenaga pendidik profesional di institusi formal. Pendekatan ini secara efektif mengikis kualitas pendidikan yang inklusif dan sekuler, sekaligus memperkuat kontrol ideologis Taliban terhadap proses pembelajaran di sekolah (Easar, et al., 2023).

Selain pembatasan akses secara struktural, kondisi sosial ekonomi dan budaya turut memperparah krisis pendidikan bagi anak perempuan. Dalam beberapa kasus, sekolah dasar yang masih terbuka pun tidak mampu melayani siswa secara maksimal karena kekurangan fasilitas, tidak adanya toilet yang layak, serta

jarak sekolah yang terlalu jauh dari pemukiman penduduk (Center for Strategic and Regional Studies, 2020). Faktor keamanan menjadi momok tersendiri; orang tua khawatir anak-anak perempuan mereka menjadi sasaran kekerasan atau penculikan di tengah meningkatnya ketidakstabilan sosial. Bersamaan dengan itu, banyak keluarga yang harus memilih untuk tidak menyekolahkan anak perempuannya karena tekanan ekonomi, mengingat biaya pendidikan tambahan (transportasi, seragam, buku) tidak sebanding dengan potensi hasil yang bisa diperoleh dalam sistem yang semakin membatasi ruang gerak perempuan (BBC, 2022).

Gambar 2.2 Data Anak Perempuan Jenjang Sekolah Menengah di Afghanistan yang tidak Bersekolah pada Tahun 2023.



(Sumber: Rumi Organization for Research, 2023)

Menurut data yang dihimpun oleh Rumi Organization for Research, seperti pada gambar 2.2, dapat dilihat bahwa jumlah anak perempuan usia sekolah

menengah yang berhenti sekolah akibat pembatasan Taliban di hampir seluruh wilayah di Afghanistan mengalami penurunan yang totalnya mencapai sekitar 2,6 juta jiwa per tahun 2023. Angka ini mencakup siswa kelas 7 hingga 12 yang tersebar di seluruh wilayah Afghanistan, dengan konsentrasi tertinggi di wilayah ibu kota Kabul, disusul oleh provinsi Balkh, Herat, dan Nangarhar (Easar, et al., 2023). Data ini menjadi bukti konkret bagaimana kebijakan represif rezim Taliban telah menciptakan kesenjangan pendidikan yang sangat lebar dan berpotensi menimbulkan krisis generasi di masa depan. Pemetaan jumlah siswa yang terdampak dapat membantu pembaca untuk memahami secara visual sebaran wilayah dengan jumlah anak perempuan putus sekolah terbanyak, sekaligus memperlihatkan dampak geografis dan budaya dari kebijakan tersebut (Ahmadi, 2022; Neyazi et al., 2022).

Di tingkat universitas, Taliban memberlakukan segregasi gender yang ketat. Pada 30 Agustus 2021, Emirat Islam Afganistan mulai memberikan perintah dimana mahasiswi hanya diizinkan belajar di ruang kelas terpisah dari mahasiswa laki-laki dan diajar oleh dosen perempuan atau, jika tidak tersedia, oleh dosen laki-laki yang lebih tua. Selain itu, mahasiswi diwajibkan mengenakan pakaian sesuai syariat Islam, meskipun tidak ada kejelasan apakah itu berarti hanya jilbab atau penutup tubuh penuh.

Selain pembatasan akses dan segregasi, Taliban kemudian mengubah kurikulum pendidikan dengan meninjau ulang mata pelajaran yang diajarkan di universitas untuk memastikan kesesuaiannya dengan interpretasi mereka terhadap nilai-nilai Islam (Limaye, 2023). Perubahan ini menghapus banyak materi yang

sebelumnya dianggap penting dalam pendidikan modern, seperti hak asasi manusia dan studi gender, serta memperkuat ideologi konservatif yang membatasi peran perempuan dalam masyarakat.

Pada 29 September 2021, Taliban kembali mengeluarkan peraturan yang melarang kehadiran wanita, baik mahasiswi maupun tenaga pengajar di Universitas Kabul. Kemudian pada Oktober 2021, mereka juga dikabarkan mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pemisahan gender di ruang terbuka seperti di Universitas dan tempat kerja. beberapa bulan setelahnya, tepatnya 23 Maret 2022, Taliban membatalkan janji mereka untuk membuka kembali sekolah menengah untuk anak perempuan, yang berdampak pada 1,1 juta wanita dan gadis muda yang terpaksa harus putus sekolah (The Afghan Times, 2024). Pada Januari 2023, rezim Taliban memperketat pembatasan terhadap pendidikan perempuan dengan mengeluarkan dekrit yang melarang anak perempuan mengikuti ujian masuk universitas. Larangan ini diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Taliban melalui surat yang dikirimkan ke universitas-universitas swasta di seluruh Afghanistan, yang menyatakan bahwa pendaftaran mahasiswa perempuan untuk ujian masuk universitas tahun 2023 tidak diperbolehkan hingga pemberitahuan lebih lanjut (Afghanistan International, 2023).

Pada 3 Desember 2024, Taliban kembali dikabarkan melarang perempuan untuk mengejar satu-satunya peluang mereka untuk tetap dapat bekerja di bawah pemerintahan Taliban, yaitu dalam bidang Kesehatan. Perempuan yang sedang menempuh pendidikan kebidanan dan keperawatan melaporkan kepada BBC Afghanistan bahwa otoritas Taliban secara efektif akan menutup sekolah tersebut

hingga pemberitahuan lebih lanjut (Human Rights Watch, 2022). Padahal, kebidanan dan keperawatan merupakan satu-satunya peluang karir yang dapat ditempuh perempuan di Afghanistan, karena petugas medis laki-laki tidak diizinkan untuk merawat pasien perempuan tanpa kehadiran *mahram*—wali laki-laki. Larangan ini berdampak pada sekitar 17.000 peserta didik perempuan dan kembali membawa mereka kepada ketidakpastian akan masa depan mereka (Drury & Gharanai, 2024).

Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian menuai kecaman internasional. UNESCO menyatakan bahwa larangan terhadap pendidikan perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan mengancam masa depan sosial, budaya, dan ekonomi Afghanistan. Hal ini akan berdampak pada isu perlindungan anak yang meningkat, seperti eksploitasi, pernikahan paksa, serta kekerasan dalam rumah tangga yang akan menimbulkan permasalahan terkait Kesehatan mental anak. Larangan Pendidikan terhadap anak perempuan ini juga akan memberikan efek yang signifikan di masa depan, dimana mereka akan kehilangan peluang kerja, meningkatkan ketergantungan mereka kepada pria, serta memperburuk siklus kemiskinan jangka panjang di Afghanistan.

2.2.2 Bidang Ketenagakerjaan dan Kehidupan Sosial

Dalam sektor ketenagakerjaan. Perempuan dilarang bekerja di berbagai institusi publik seperti pengadilan, kementerian, lembaga penyiaran, dan kantor pemerintahan. Tak hanya itu, larangan juga diberlakukan di sektor swasta dan organisasi non-pemerintah (NGO). Hal ini dibuktikan dari perintah resmi yang dikeluarkan oleh otoritas Taliban pada Desember 2022, yang melarang perempuan

bekerja di NGO kemanusiaan. Padahal, menurut data dari International Rescue Committee (IRC), dari 8000 staf mereka di Afghanistan, lebih dari 3000 adalah perempuan. Akibat kebijakan ini, IRC untuk pertama kalinya sejak 1988 harus menghentikan program-programnya karena tidak bisa memberikan layanan tanpa staf perempuan (The Lancet, 2023). Organisasi Médecins Sans Frontières (MSF) juga terdampak keras, mengingat lebih dari 90% tenaga medis di rumah sakit bersalin Khost adalah perempuan, yang membantu kelahiran sekitar 1800 bayi setiap bulan (Frontières, 2022).

Larangan ini menimbulkan dampak serius terhadap layanan kemanusiaan, khususnya yang menyangkut perempuan dan anak-anak. Tanpa kehadiran pekerja perempuan, banyak layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial tidak dapat dijalankan secara efektif. UN Women menyatakan bahwa penghapusan perempuan dari pekerjaan kemanusiaan merusak upaya penyelamatan nyawa dan bantuan dasar yang ditujukan bagi perempuan dan kelompok rentan (UN Women, 2024). Dalam survei yang dilakukan oleh GiHA WG (*Gender in Humanitarian Action Working Group*) pada Mei 2023 menemukan bahwa sebanyak 42% pekerja perempuan dalam beberapa organisasi yang di survei bekerja secara daring dari rumah dan mereka beroperasi dengan hanya 25% pekerja laki-laki yang dapat hadir secara fisik di kantor mereka. Tidak hanya itu, 36% perempuan juga menyatakan bahwa mereka tidak dapat mengakses layanan kemanusiaan dibandingkan dengan 28% laki-laki akibat larangan bekerja untuk perempuan. yang berdampak terhadap keterjangkauan perempuan Afghanistan dalam proses seleksi, asesmen kebutuhan, ataupun distribusi (GiHA, 2023).

Lebih jauh lagi, data menunjukkan bahwa pembatasan ini telah berdampak langsung terhadap partisipasi tenaga kerja perempuan di Afghanistan. Antara Juni 2021 hingga akhir 2022, jumlah perempuan yang bekerja menurun sebesar 25%, sementara penurunan di kalangan laki-laki hanya sekitar 7%. Secara keseluruhan, hanya sekitar 24% perempuan dewasa yang bekerja, baik di dalam maupun di luar rumah, dibandingkan dengan 82% laki-laki dewasa. Hal ini mengindikasikan adanya tingkat pengangguran yang sangat tinggi di kalangan perempuan, sebagai dampak langsung dari pembatasan pekerjaan dan mobilitas (UN Women, 2023).

Situasi ini turut mendorong munculnya mekanisme *coping* negatif di masyarakat. Berdasarkan laporan ODI (2024), data *The Afghanistan Multiple Indicator Cluster Surveys* (MICS) menunjukkan bahwa angka pernikahan sebelum usia 18 tahun sempat menurun dari 46,3% pada 2010–2011 menjadi 38,9% pada 2022–2023. Namun, tren positif ini kini terancam oleh kebijakan Taliban. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden, khususnya perempuan muda dan berpendidikan, menganggap usia ideal untuk menikah berada di rentang 18 hingga 25 tahun. Namun demikian, sebanyak 69% dari mereka menyatakan mengetahui praktik pernikahan di bawah usia tersebut masih terjadi di komunitas mereka (Safi, Browne, Kamninga, & Khan, 2024). Praktik ini, bersama dengan meningkatnya pekerja anak, menjadi respons atas tekanan ekonomi dan sosial yang semakin berat, dan secara khusus berdampak pada anak perempuan dan laki-laki. Perempuan—terutama penerima bantuan—terus menyuarakan bahwa kebutuhan paling mendesak mereka saat ini adalah akses terhadap mata pencaharian yang aman dan berkelanjutan (UN Women, 2023).

Tabel 2.2 Perubahan pola pada pola pernikahan di Afghanistan: 2010-2023

Indikator	2010-2011	2022-2023
Perempuan yang menikah dibawah usia 18 tahun	46.3%	38.9%
Perempuan usia 20-24 yang menikah dibawah usia 15 tahun	15%	9.6%
Perempuan usia 20-24 yang menikah dibawah usia 18 tahun	40.4%	28.7%
Perempuan yang menikah sebelum usia 15 tahun	15.2%	11.8%
Perempuan muda usia 15-19 tahun saat ini menikah	19.8%	16.4%

(Sumber: *The Afghanistan Multiple Indicator Cluster Surveys* 2010-2011 dan 2022-2023)

Selain pelarangan kerja, sejak pertengahan tahun 2022 perempuan Afghanistan juga dikenakan pembatasan ketat dalam berpakaian dan mobilitas. Taliban mewajibkan perempuan untuk mengenakan pakaian longgar yang menutupi seluruh tubuh. Taliban juga memberikan ketentuan bagi Perempuan Afghanistan dalam hal berpakaian seperti diharuskan menggunakan cadar pada saat beraktivitas, larangan menggunakan pakaian berwarna cerah atau mencolok, hingga larangan terhadap penggunaan aksesoris. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah Taliban melarang perempuan Afghanistan bekerja di NGO yang ada di Afghanistan karena cara berpakaian mereka yang dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam (Farzan et al., 2022). Dalam dokumen kebijakan moralitas yang dikeluarkan tahun 2024, Taliban menyatakan bahwa ketidakpatuhan terhadap

aturan berpakaian dapat dikenai sanksi pidana atau sosial, termasuk penahanan dan pemukulan oleh “polisi moral”² (UN Women, 2024).

Perempuan di Afghanistan juga menghadapi pembatasan mobilitas yang sangat ketat di bawah pemerintahan Taliban. Salah satu peraturan paling mencolok adalah larangan bagi perempuan untuk bepergian jarak jauh—umumnya lebih dari 72 kilometer—tanpa didampingi oleh *mahram*³ (Shayan, 2024). Aturan ini tidak hanya diberlakukan secara informal, tetapi juga ditegaskan dalam berbagai kebijakan moralitas yang dikeluarkan oleh otoritas Taliban sejak 2022. Dalam praktiknya, perempuan yang melanggar peraturan ini sering kali dihentikan di pos pemeriksaan, dipaksa kembali ke rumah, bahkan dalam beberapa kasus mengalami kekerasan fisik atau verbal oleh aparat “polisi moral” Taliban (UN News, 2024).

Lebih dari itu, penggunaan transportasi umum oleh perempuan juga dibatasi secara signifikan. Banyak operator bus dan taksi enggan mengangkut perempuan yang tidak didampingi mahram karena takut terkena sanksi atau penutupan usaha oleh otoritas setempat. Beberapa wilayah seperti Kandahar dan Herat, bahkan menerapkan kebijakan jam malam khusus bagi perempuan, di mana mereka tidak diperbolehkan berada di luar rumah setelah waktu tertentu di malam hari, terlepas dari tujuannya atau kondisinya. Kebijakan ini menyebabkan perempuan kesulitan mengakses layanan dasar seperti fasilitas kesehatan darurat, apotek, atau bantuan hukum ketika terjadi kekerasan domestik (UN Women, 2024).

² "polisi moral" adalah unit yang berada di bawah Kementerian Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan yang bertugas menegakkan hukum syariat berdasarkan tafsir Taliban. (Amnesty International, 2024)

³ laki-laki dewasa dari keluarganya seperti ayah, saudara laki-laki, atau suami

Kemudian pada bulan Juli 2023, Taliban kembali mengeluarkan peraturan baru yang terkait perintah penutupan salon kecantikan yang merupakan satu-satunya mata pencaharian bagi sekitar 60.000 perempuan Afghanistan (Limaye, 2023). Hal ini menimbulkan banyaknya perempuan yang kehilangan hak mereka untuk beraktivitas secara bebas serta kehilangan pekerjaan mereka. Segala pembatasan ini kemudian memunculkan rasa tidak aman bagi para perempuan untuk melakukan aktivitasnya dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan pendidikan dan pekerjaannya demi keamanan mereka.

Dalam laporan *BBC News*, banyak perempuan menyatakan kehilangan rasa otonomi dan keamanan karena bergantung sepenuhnya pada laki-laki untuk urusan harian, termasuk hal-hal yang seharusnya bersifat pribadi seperti pergi ke dokter atau pasar (2024). Pembatasan ini juga menghalangi partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi, memperburuk isolasi psikologis, serta menambah beban pada keluarga, terutama yang tidak memiliki anggota laki-laki yang bisa mendampingi mereka setiap saat.

Kebijakan ini telah menciptakan lingkungan yang mengkhawatirkan bagi perempuan dan menyebabkan banyak perusahaan serta organisasi enggan untuk mempekerjakan perempuan karena takut akan konsekuensi hukum dan sosial dari otoritas Taliban. Hal ini memperparah ketimpangan gender dalam bidang ekonomi dan sosial. Data dari Human Rights Watch menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja formal di Afghanistan telah turun drastis menjadi di bawah 15% pada tahun 2023, angka terendah dalam dua dekade terakhir (Human Rights Watch, 2023).

2.2.3 Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Publik

Dalam kehidupan sipil dan politik, ruang partisipasi perempuan tentunya mengalami mengalami kemunduran drastis. Perempuan tidak hanya dikeluarkan dari jabatan pemerintahan, tetapi juga secara eksplisit dilarang terlibat dalam kegiatan politik, organisasi masyarakat sipil, dan proses pengambilan keputusan publik. Semua posisi politik yang sebelumnya dijabat oleh perempuan, baik di tingkat nasional maupun lokal, telah dihapus. Hingga tahun 2024, tidak ada satu pun perempuan yang duduk dalam struktur pemerintahan Taliban, baik dalam kabinet, parlemen, maupun dalam lembaga yudikatif atau administratif lainnya (UN Women, 2024).

Tepat pada 17 September 2021, Taliban secara sistematis membubarkan Kementerian Urusan Perempuan (*Ministry of Women's Affairs*), yang sebelumnya menjadi institusi utama dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Sebagai gantinya, mereka membentuk Kementerian untuk Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan—*Ministry for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice*—yang tugas utamanya justru mengawasi moralitas publik dan membatasi kebebasan perempuan, bukan melindunginya (France 24, 2024).

Dampaknya, hampir 500 karyawan yang kehilangan pekerjaan dan keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan menjadi nihil (The Afghan Times, 2024). Tanpa perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, sebagai representasi dalam pemerintahan, tidak ada mekanisme yang bisa menjamin bahwa hak dan kebutuhan perempuan dipertimbangkan secara setara. Selain itu, akses terhadap keadilan bagi perempuan juga semakin tertutup. Banyak

kasus kekerasan berbasis gender, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau pernikahan paksa, tidak ditangani dengan adil karena sistem hukum yang berlaku didominasi oleh interpretasi ekstremis terhadap hukum syariah, yang kerap merugikan posisi perempuan.

Sejak Taliban mengambil alih kekuasaan, lebih dari 300 kasus femisida telah tercatat, dan lebih dari 800 kasus kekerasan berbasis gender dilaporkan, dengan lebih dari separuhnya diduga dilakukan oleh anggota Taliban (Townsend, 2024). Perempuan yang mengikuti aksi, mengaku mendapatkan perlakuan tidak baik dari aparat Taliban, mulai dari penangkapan paksa, pelecehan, dan penyiksaan. Selama masa penahanan tersebut, disebutkan bahwa para aktivis perempuan diperlakukan tidak adil oleh aparat seperti dipukul, disetrum, bahkan diperkosa (Rukshana, 2024). Perempuan tidak bisa dengan bebas mengakses pengadilan atau melaporkan pelanggaran hak karena harus menghadapi aparat hukum yang semuanya laki-laki, dan sering kali memerlukan pendampingan mahram (UN News, 2024). Laporan investigasi dari Rukshana (2024) mengungkap bahwa perempuan korban kekerasan kerap ditolak ketika mencoba melapor ke kantor polisi karena dianggap tidak layak melapor tanpa kehadiran mahram. Bahkan dalam kasus-kasus yang dilaporkan, aparat lebih sering penyelesaian damai yang merugikan korban.

Situasi ini berkontribusi pada meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum berkurang (Rukshana, 2024). Banyak perempuan yang memilih untuk diam atas pelanggaran yang mereka alami karena takut dikriminalisasi atau diintimidasi. Berkurangnya

representasi perempuan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan juga mengakibatkan pembentukan kebijakan yang tidak responsif gender, memperparah marginalisasi perempuan dalam semua aspek kehidupan bernegara. Malala Yousafzai, seorang aktivis gender, bahkan menganggap tindakan Taliban sebagai bentuk penindasan gender yang ekstrim dan mengkategorikannya sebagai “*gender apartheid*” (Yousafzai & Joya, 2025).

2.3 Dinamika Gerakan Perempuan Afghanistan

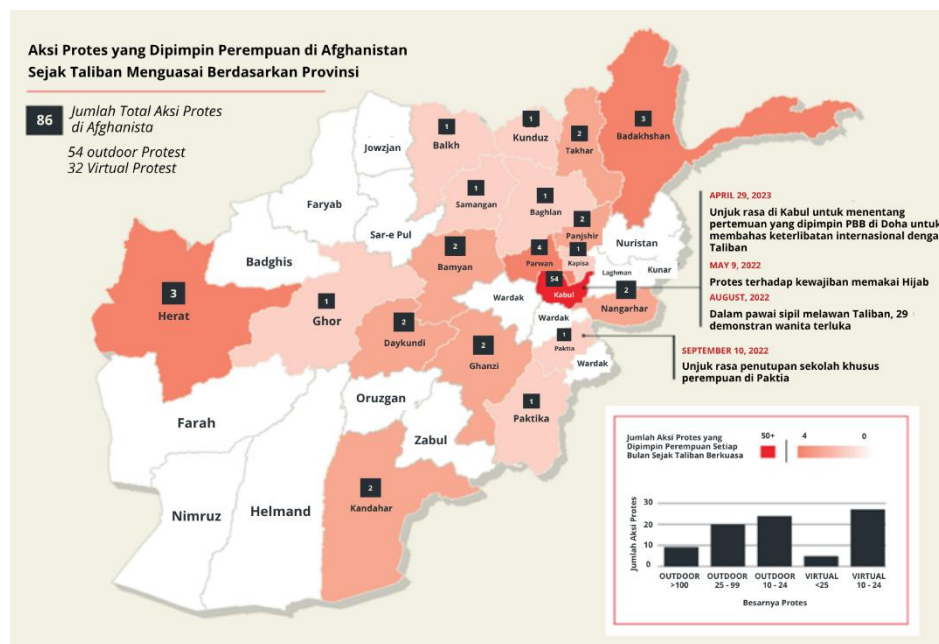
Serangkaian pengaturan sistematis yang diterapkan oleh Taliban telah memberikan dampak pada berkurangnya akses perempuan terhadap berbagai aspek kehidupan sosial mereka. Namun, keadaan ini justru melahirkan babak baru dalam perjuangan perempuan Afghanistan. Alih-alih terbungkam, mereka menunjukkan perlawanan melalui strategi adaptif, baik secara terbuka maupun dalam jaringan bawah tanah yang tersembunyi. Gerakan perempuan yang dahulu berjalan secara legal melalui organisasi, komunitas, dan institusi publik, kini berubah menjadi bentuk-bentuk perjuangan yang lebih tersembunyi namun tetap lantang secara makna.

2.3.1 Aktivisme Perempuan Lokal sebagai Respon terhadap Rezim Pembatasan

Di tengah pengaturan sistematis yang diberlakukan oleh Taliban, perempuan Afghanistan terus menunjukkan bentuk-bentuk perlawanan yang konsisten dan bervariasi. Perempuan Afghanistan menanggapi pembatasan dengan gelombang protes yang tersebar di seluruh negeri. Aksi-aksi ini tidak hanya menuntut hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan berpakaian, tetapi juga

absennya peran komunitas internasional terhadap situasi mereka. Meskipun berskala kecil dan kerap bersifat diam-diam, gerakan ini mencerminkan kekuatan moral dan keberanian luar biasa di tengah kondisi represif.

Gambar 2.3 Peta Persebaran Gerakan Protes Perempuan Afghanistan



(Sumber: Center for a New American Security 2023)

Menurut laporan dari *Center for a New American Security* (2023), setidaknya terdapat 86 aksi protes yang dipimpin perempuan sejak Taliban mengambil alih kekuasaan. Dari jumlah itu, 54 aksi dilakukan di ruang publik, sementara 32 sisanya berlangsung secara tertutup—dilakukan di dalam ruangan dengan dokumentasi yang kemudian disebarluaskan melalui media sosial dan saluran daring lain sebagai bentuk kampanye digital. Sebagian besar protes ini menyoroti pelanggaran terhadap hak-hak dasar perempuan, terutama akses terhadap pendidikan, pekerjaan, pangan, dan partisipasi publik. Bahkan beberapa protes

secara langsung mengecam lembaga internasional, seperti demonstrasi pada 29 April 2023 di Kabul, yang menolak wacana pengakuan internasional terhadap pemerintahan Taliban dalam konferensi yang diselenggarakan PBB di Doha (Curtis, 2023).

Gambar 2.4 Unggahan Dr. Bahar Jalali di platform media sosial 'X'



(Sumber: X/@RoxanaBahar1, 2021)

Salah satu bentuk perlawanan paling simbolik terjadi pada September 2021 dengan kampanye daring "*Don't Touch My Clothes*". Kampanye ini diawali oleh Dr. Bahar Jalali, seorang mantan profesor Sejarah di American University, Afghanistan, di mana ia para perempuan Afghanistan mengunggah foto mereka mengenakan pakaian tradisional berwarna cerah dengan menggunakan tagar *#DoNotTouchMyClothes* dan *#AfghanistanCulture* sebagai bentuk protes terhadap kewajiban mengenakan *burqa* hitam ala Taliban yang dianggap menyerang

identitas dan kedaulatan Afghanistan (BBC News, 2021). Aksi ini menjadi representasi penolakan terhadap penghapusan identitas budaya dan penyeragaman paksa yang dikenakan atas nama moralitas agama. Selanjutnya, demonstrasi juga terjadi terkait kebijakan wajib hijab, penutupan sekolah menengah untuk anak perempuan, serta larangan kerja di organisasi non-pemerintah (Amnesty International, 2023).

Gambar 2.5 Gerakan Protes “Bread, Work, Freedom” di Kabul



(Sumber: 8AM Media, 2024)

Salah satu bentuk respon perempuan Afghanistan terhadap kebijakan represif Taliban tercermin dalam gerakan yang mengusung slogan “Bread, Work, Freedom”. Slogan ini pertama kali muncul dalam aksi-aksi protes setelah pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban, dan dengan cepat menjadi simbol tuntutan kolektif atas akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pekerjaan, dan kebebasan sipil. Makna dari ketiga elemen dalam slogan tersebut mencerminkan dimensi struktural dari krisis yang dihadapi perempuan, termasuk

feminisasi kemiskinan, pembatasan hak atas pekerjaan yang layak, serta pelarangan terhadap kebebasan bergerak dan berekspresi (Rezaie, 2024).

Meskipun ruang publik semakin dibatasi dan risiko penindasan meningkat, gerakan ini terus berlangsung dalam berbagai bentuk, mulai dari aksi jalanan terbatas hingga kampanye digital yang disebarakan melalui media sosial. Keberlanjutan gerakan ini juga memperlihatkan kemampuan adaptif perempuan Afghanistan dalam membangun jaringan solidaritas dan mempertahankan identitas kolektif di tengah tekanan. Selain berfungsi sebagai strategi mobilisasi, slogan *“Bread, Work, Freedom”* juga berperan dalam membentuk narasi politik yang menyoroti pelanggaran sistemik terhadap hak-hak perempuan, baik di tingkat nasional maupun internasional (Kohi, 2024). Dalam konteks ini, gerakan perempuan tidak hanya merefleksikan bentuk resistensi terhadap norma yang represif, tetapi juga menjadi upaya strategis untuk mempertahankan eksistensi sosial dan politik mereka dalam tatanan yang semakin tertutup.

2.3.2 Peran Komunitas Akar Rumput, Jaringan Bawah Tanah, dan Diaspora

Dalam menghadapi represi, perlawanan perempuan tidak hanya muncul di ruang publik, tetapi juga bertransformasi secara strategis ke dalam ruang-ruang privat dan digital. Banyak komunitas lokal membentuk jaringan bawah tanah untuk menyelenggarakan sekolah-sekolah rahasia bagi anak-anak perempuan yang tidak lagi memiliki akses ke pendidikan formal. Rumah-rumah pribadi dijadikan ruang belajar, di mana guru-guru perempuan dengan diam-diam mengajarkan pelajaran matematika, sains, dan bahasa. Di sisi lain, platform komunikasi digital seperti WhatsApp, Telegram, dan Signal digunakan untuk berbagi materi edukatif,

menyebarkan informasi, dan menyusun strategi perlawanan secara kolektif dan tersembunyi (8AM Daily, 2023).

Perempuan diaspora Afghanistan juga memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Afghanistan melalui berbagai inisiatif di tingkat internasional. Mereka mengorganisir kampanye global, memanfaatkan media internasional dan forum diplomatik untuk menarik perhatian lembaga-lembaga seperti PBB, Uni Eropa, dan organisasi hak asasi manusia terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di dalam negeri.

Salah satu contoh nyata adalah partisipasi perempuan diaspora dalam forum internasional seperti Komisi Status Perempuan (CSW) PBB. Pada sesi ke-66 CSW, para ahli perempuan Afghanistan berkumpul di New York untuk membahas bagaimana mekanisme internasional dapat lebih efektif dalam menegakkan hak-hak perempuan dan anak perempuan di Afghanistan. Mereka menyerukan kepada komunitas internasional untuk mendukung aktivis hak-hak perempuan yang menghadapi risiko besar di bawah rezim Taliban (UN Women, 2022).

Selain itu, jaringan diaspora seperti Afghan Women Europe (AWE) dan European Network of Migrant Women (ENoMW) telah aktif dalam mendukung evakuasi, pemukiman kembali, dan integrasi perempuan Afghanistan yang melarikan diri dari negara tersebut. Mereka juga menyelenggarakan berbagai acara publik, lokakarya pengembangan kapasitas, dan kampanye internasional untuk meningkatkan kesadaran tentang situasi perempuan Afghanistan. Misalnya, kampanye *#LetHerLearn* diluncurkan untuk menyoroti larangan pendidikan bagi

perempuan dan anak perempuan di Afghanistan, dengan tujuan mempengaruhi kebijakan Uni Eropa.

Gambar 2.6 Kampanye Daring *#Letherlearn* oleh *Afghan Women Eropa* (AWE) sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Taliban terhadap pendidikan perempuan



(Sumber: Afghan Women Europe, 2023)

Perempuan diaspora juga mendukung aktivis lokal melalui pendanaan, pelatihan digital, dan advokasi kebijakan. Beberapa organisasi diaspora telah memberikan bantuan keuangan langsung kepada rumah tangga yang dikepalai perempuan, serta mendukung pengusaha perempuan melalui hibah mikro. Mereka juga menggunakan platform digital untuk menyediakan pelatihan dan sumber daya bagi perempuan di Afghanistan yang menghadapi pembatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Jaringan transnasional ini menjadi saluran vital untuk menjaga agar suara perempuan Afghanistan tetap terdengar di panggung global, meskipun secara fisik mereka telah dibungkam di tanah air mereka. Melalui

solidaritas dan kolaborasi lintas batas, perempuan diaspora Afghanistan terus memperjuangkan hak-hak dan kebebasan perempuan di Afghanistan, serta menekan komunitas internasional untuk mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap pelanggaran HAM yang terjadi.

2.3.3 Reaksi Taliban terhadap Gerakan Perempuan

Dalam menghadapi aksi-aksi damai yang dilakukan oleh perempuan—baik di ruang publik maupun secara daring—Taliban merespons dengan tindakan represif dan intimidatif yang sistematis. Otoritas Taliban dikabarkan telah menggunakan strategi pembungkaman yang mengandalkan kekerasan fisik, penangkapan sewenang-wenang, pengawasan, serta intimidasi psikologis. Laporan dari *Human Rights Watch* (2022) mencatat bahwa banyak aktivis perempuan yang ditangkap tanpa surat penahanan resmi, kemudian ditahan dalam kondisi yang buruk, dan kerap mengalami penyiksaan selama interogasi. Beberapa perempuan yang mengikuti demonstrasi damai bahkan dilaporkan mengalami kekerasan seksual, dilecehkan secara verbal, serta dipaksa menandatangani pernyataan bahwa mereka tidak akan lagi ikut dalam aktivitas publik atau berbicara kepada media internasional. Penahanan ini tidak jarang dilakukan secara rahasia, dan keluarga mereka pun tidak diberi informasi tentang keberadaan atau kondisi mereka.

Laporan dari Afghan Witness (2024) mengungkap adanya setidaknya 332 kasus femisida—pembunuhan terhadap perempuan karena identitas gender mereka—yang terjadi di Afghanistan dalam kurun waktu sejak Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021 hingga pertengahan 2024 (Kawa, 2024). Sebagian besar korban adalah aktivis, jurnalis, mahasiswi, serta perempuan yang menolak

aturan moral atau pembatasan Taliban. Banyak di antara mereka dibunuh dalam kondisi misterius, tanpa investigasi lanjutan, dan pelakunya sering kali tidak diadili. Dalam sejumlah kasus, otoritas Taliban bahkan diduga menjadi pelaku langsung atau menutup-nutupi kejahatan tersebut, terutama ketika korban adalah perempuan yang pernah terlibat dalam kegiatan sosial, pendidikan, atau protes damai. Afghan Witness menyoroti bahwa pola pembunuhan ini bukanlah insiden sporadis, melainkan bagian dari kampanye sistematis untuk membungkam, menakut-nakuti, dan menghapus eksistensi perempuan dari ruang publik. Laporan ini memperkuat narasi bahwa represi terhadap perempuan di Afghanistan bukan hanya bersifat legal atau administratif, tetapi telah meningkat menjadi bentuk kekerasan ekstrem yang mengancam nyawa (Kawa, 2024).

Taliban juga menargetkan organisasi-organisasi perempuan dan LSM yang aktif dalam isu pendidikan, bantuan hukum, serta perlindungan korban kekerasan. Banyak lembaga yang terpaksa ditutup atau dibubarkan paksa. Aktivitas media sosial yang menyuarakan penolakan terhadap kebijakan Taliban pun diawasi dengan ketat. Aktivis yang menyebarkan dokumentasi aksi—termasuk foto atau video protes—melalui platform seperti WhatsApp, Facebook, dan Telegram dilaporkan menjadi sasaran ancaman langsung, baik secara daring maupun fisik (Amnesty International, 2023). Pembatasan kemudian diperluas bukan hanya pada aktivitas politik, tetapi juga pada ekspresi budaya. Sebuah dekrit yang disahkan pada tahun 2024 secara resmi melarang perempuan untuk menyanyi, baik di ruang publik maupun dalam rekaman digital atau acara keluarga. Larangan ini, menurut laporan NPR, mencerminkan upaya Taliban untuk menghapus kehadiran simbolik

perempuan dari ruang sosial dan emosional masyarakat. Bahkan hal-hal yang berkaitan dengan identitas budaya, seni, dan tradisi pun tidak luput dari sensor rezim ini.

Laporan *Center for a New American Security* (2023) mencatat bahwa Taliban secara aktif membatasi kegiatan demonstrasi, termasuk dengan menyebar aparat bersenjata untuk membubarkan aksi yang hanya berisi puluhan perempuan. Meski banyak protes yang berskala kecil—hanya 10 hingga 30 peserta—reaksi Taliban tetap sangat keras. Dalam satu insiden pada Agustus 2022, 29 perempuan mengalami luka-luka akibat kekerasan aparat saat melakukan pawai sipil di Kabul. Bahkan protes yang dilakukan secara tertutup, di ruang privat, tetap membawa risiko penangkapan jika terendus aparat.

Tindakan represif ini menunjukkan bahwa Taliban tidak hanya menolak keterlibatan perempuan dalam ruang publik, tetapi juga berusaha membungkam eksistensi mereka sebagai subjek sosial dan politik. Hal ini menjadi cerminan nyata dari praktik *gender apartheid*—sebuah sistem diskriminasi sistematis berbasis gender yang memisahkan dan mengecualikan perempuan dari kehidupan publik secara menyeluruh. Istilah ini digunakan oleh para aktivis seperti Malala Yousafzai dan Zahra Joya untuk menggambarkan betapa ekstremnya pembatasan yang diberlakukan Taliban (Thomson Foundation, 2024).

Praktik *gender apartheid* ini bukan hanya membahayakan hak-hak individu perempuan, tetapi juga akan memberikan dampak yang signifikan bagi masa depan domestik Afghanistan, karena telah mempersempit peluang partisipasi setengah populasi dalam pembangunan negara. Pendekatan mereka tidak sekadar

menegakkan kebijakan konservatif, tetapi merepresentasikan proyek sistematis yang membatasi peran perempuan dalam kehidupan sosial—baik secara fisik, hukum, maupun simbolik. Situasi ini telah mendorong berbagai lembaga internasional, termasuk UNAMA dan Human Rights Watch, menyebut Afghanistan sebagai negara dengan pembatasan tertinggi terhadap hak-hak perempuan (ABC News, 2023).

2.4 Kehadiran UN Women

Dalam konteks ini kehadiran aktor internasional menjadi sangat krusial. Ketika struktur domestik di suatu negara tidak lagi mampu atau bersedia melindungi hak-hak dasar warga negaranya—terutama perempuan—maka intervensi dari komunitas global menjadi suatu keperluan. Upaya sistematis Taliban untuk mengurangi akses perempuan dari ruang publik melalui rezim pengaturan, membatasi akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, kebebasan berekspresi, serta partisipasi sosial-politik, mencerminkan bentuk kekerasan struktural yang terorganisir dan mendalam. Praktik ini telah melahirkan situasi yang oleh banyak aktivis dan pengamat disebut sebagai *gender apartheid*—sebuah sistem diskriminasi berbasis gender yang mengecualikan perempuan dari seluruh aspek kehidupan sosial dan publik secara sistematis dan menyeluruh. Istilah ini menekankan bahwa pelanggaran yang terjadi bukan sekadar kebijakan represif biasa, melainkan bentuk ekstrim yang mengancam eksistensi perempuan sebagai warga negara penuh dan subjek sosial.

Dalam situasi darurat seperti ini, UN Women hadir sebagai aktor global dengan kapasitas khusus yaitu merespons krisis berbasis gender. Sebagai badan

PBB yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, UN Women berperan penting dalam mengisi kekosongan perlindungan institusional di tingkat nasional, membangun solidaritas internasional, serta memastikan bahwa pelanggaran hak-hak perempuan di Afghanistan tidak diabaikan oleh masyarakat global. Peran ini mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai hak asasi manusia universal dan pentingnya mempertahankan ruang eksistensi perempuan dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang tengah terancam oleh ideologi ekstrem.

Sebelum kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan pada tahun 2021, Afghanistan pernah mengalami fase transisi politik yang membuka ruang bagi partisipasi aktor internasional dalam proses rekonstruksi negara. Periode ini berlangsung sejak tergulingnya rezim Taliban pada 2001 dan ditandai oleh terbentuknya pemerintahan baru yang secara formal berkomitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. Dalam situasi ini, berbagai organisasi internasional, termasuk UN Women, mulai terlibat aktif dalam membantu proses pembangunan sosial dan institusional di Afghanistan, khususnya dalam hal pemberdayaan perempuan yang selama era Taliban sebelumnya sangat terpinggirkan.

Kehadiran UN Women di Afghanistan pada era ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif. Organisasi ini hadir dengan mandat untuk mendorong integrasi perspektif gender dalam sistem pemerintahan, struktur hukum, serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Afghanistan. Upaya tersebut dilakukan melalui program-program yang tidak hanya menasar perempuan secara langsung, tetapi juga berusaha membentuk lingkungan yang kondusif bagi

transformasi sosial secara lebih luas. Dengan demikian, pemahaman terhadap apa yang telah dilakukan UN Women selama periode 2002–2021 menjadi penting untuk menilai sejauh mana capaian dan tantangan dalam memperjuangkan norma kesetaraan gender di Afghanistan, serta bagaimana capaian tersebut membentuk fondasi strategis ketika organisasi ini kembali dihadapkan pada situasi represif pasca-2021.

2.4.1 Upaya UN Women pada Periode 2002–2021: Fondasi Advokasi Kesetaraan Gender di Afghanistan

Sejak tahun 2002, setelah tergulingnya rezim Taliban pertama, Afghanistan memasuki fase transisi politik dan pembangunan institusional yang turut membuka ruang bagi aktor internasional untuk berkontribusi dalam rekonstruksi negara, termasuk dalam isu kesetaraan gender. Dalam konteks ini, UN Women memegang peran penting sebagai pelopor dalam mempromosikan norma dan kebijakan kesetaraan gender melalui berbagai program yang dirancang untuk memberdayakan perempuan Afghanistan di ranah sosial, ekonomi, politik, dan hukum.

Salah satu pilar utama dari upaya UN Women pada periode 2002–2021 adalah mendukung penguatan institusi gender nasional, terutama Ministry of Women's Affairs (MoWA), agar mampu memainkan peran koordinatif dan implementatif dalam mengarusutamakan gender ke dalam kebijakan nasional. UN Women memberikan dukungan teknis dalam penyusunan dan pelaksanaan National Action Plan for the Women of Afghanistan (NAPWA) serta mendorong partisipasi aktif perempuan dalam proses politik, termasuk melalui keterlibatan dalam pemilu dan forum-forum pengambilan keputusan (SIDA, 2019).

Secara programatik, UN Women mengembangkan berbagai inisiatif dalam lima ranah prioritas; *Elimination of Violence Against Women* (EVAW), pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan perdamaian, penguatan sistem hukum dan perlindungan, serta penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil. Contohnya, dalam program EVAW, UN Women membantu MoWA dan LSM mitra membangun shelter bagi perempuan korban kekerasan, memperkuat sistem rujukan layanan *Gender Based Violence*, serta melakukan advokasi atas implementasi hukum EVAW yang disahkan pada 2009 (UN Women, 2017).

UN Women juga menjalankan berbagai pelatihan ekonomi bagi perempuan yang terpinggirkan, termasuk janda dan kepala rumah tangga perempuan, dengan tujuan menciptakan ketahanan ekonomi keluarga. Pelatihan tersebut meliputi pengelolaan usaha kecil, keterampilan kewirausahaan, dan pendirian koperasi perempuan di wilayah seperti Balkh, Herat, dan Kabul. Tak hanya aspek ekonomi, UN Women turut menyelenggarakan pendidikan kesehatan reproduksi, pelatihan kepemimpinan, serta seminar komunitas yang memperkuat kesadaran perempuan terhadap hak-haknya. Inisiatif "*safe markets*" juga dikembangkan untuk menciptakan ruang publik yang aman dan ramah gender bagi perempuan bekerja (SIDA, 2019).

Secara kuantitatif, pada periode 2014–2016 saja, UN Women telah memberdayakan lebih dari 239.000 perempuan dan 3.475 laki-laki melalui pelatihan, advokasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat di berbagai provinsi (Rumadaul, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa UN Women tidak hanya

memfokuskan pendekatan pada perempuan semata, melainkan juga melibatkan laki-laki sebagai bagian dari strategi transformasi sosial yang inklusif.

Dalam pelaksanaannya, UN Women menjalin kemitraan dengan pemerintah *de facto* Afghanistan saat itu, khususnya melalui MoWA dan sejumlah kementerian terkait. Pemerintah menyambut baik dukungan UN Women, namun efektivitas implementasi sering kali terhambat oleh keterbatasan kapasitas birokrasi, ketergantungan pada donor, dan kerentanan terhadap tekanan politik internal. Evaluasi independen oleh SIDA mencatat bahwa meskipun program-program UN Women sejalan dengan kerangka pembangunan nasional dan komitmen internasional seperti UNDAF dan CEDAW, masih terdapat tantangan signifikan berupa minimnya analisis kontekstual, kurangnya pelibatan organisasi akar rumput, serta ketimpangan distribusi sumber daya yang dikuasai oleh elite perkotaan (SIDA, 2019).

Respon masyarakat lokal terhadap upaya UN Women bersifat beragam. Di daerah perkotaan seperti Kabul dan Mazar-i-Sharif, perempuan mulai terlibat lebih aktif dalam ruang publik dan struktur formal. Namun di pedesaan konservatif, norma patriarkal dan ketakutan terhadap stigma sosial kerap menghalangi perempuan untuk ikut serta. Meski begitu, kehadiran UN Women tetap dianggap penting secara simbolik oleh berbagai pemangku kepentingan, karena menunjukkan adanya keberpihakan komunitas internasional terhadap hak-hak perempuan Afghanistan (Rumadaul, 2017).

Secara keseluruhan, meskipun pelaksanaan program-program UN Women menghadapi berbagai kendala struktural, sosial, dan keamanan, upaya organisasi

ini dapat dikatakan signifikan dalam membangun fondasi normatif dan kelembagaan kesetaraan gender di Afghanistan. Program-programnya berhasil meningkatkan kapasitas dan kesadaran gender di berbagai lapisan masyarakat, memperluas partisipasi perempuan, dan menciptakan jaringan advokasi lokal yang tetap bertahan bahkan di bawah tekanan politik pasca-2021. Fondasi ini menjadi warisan penting dalam strategi adaptif UN Women ketika harus beroperasi kembali di bawah kondisi yang jauh lebih restriktif pasca kembalinya Taliban berkuasa.